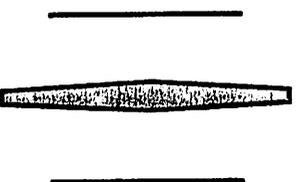




**PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 24 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2019**



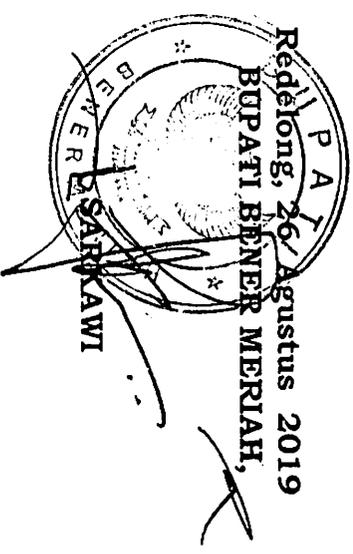
BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بئر مريه

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang terdiri dari (a) Neraca; (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Laporan Arus Kas; (d) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (e) Laporan Operasional; (f) Laporan Arus Kas; (g) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (h) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasar sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.



DAFTAR ISI

Peraturan Bupati Bener meriah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Lampiran I

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

10

Lampiran II

Penjabaran realisasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Dinas Pendidikan	12
2. Dinas Kesehatan	35
3. Rumah Sakit Umum	57
4. Puskesmas Perawatan Bandar	66
5. Puskesmas Perawatan Buntul Kemumu	68
6. Puskesmas Perawatan Pante Raya	70
7. Puskesmas Perawatan Lampahan	72
8. Puskesmas Perawatan Singah Mulo	74
9. Puskesmas Simpang Tiga	76
10. Puskesmas Simpang Teritit	78
11. Puskesmas Ronga-Ronga	80
12. Puskesmas Belang Rakal	82
13. Puskesmas Samar Kilang	84
14. Puskesmas Mesidah	86
15. Puskesmas Bener Kelipah	88
16. Puskesmas Ramung.....	91
17. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	93
18. Badan Kesatuan Bangsa dan politik.....	108
19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.....	115
20. Dinas Sosial.....	121
21. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.....	128
22. Dinas Pertanahan Kabupaten.....	136
23. Dinas Lingkungan Hidup.....	142
24. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	148
25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.....	154
26. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.....	161
27. Dinas Perhubungan.....	172
28. Dinas Komunikasi dan Informatika.....	179
29. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.....	185
30. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.....	192

Peraturan Bupati Bener meriah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

31. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.....	199
32. Dinas Pariwisata.....	203
33. Dinas Pertanian dan Pangan.....	216
34. Dinas Perdagangan.....	226
35. DPRK Kabupaten Bener Meriah	238
36. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	240
37. Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah.....	241
38. Sekretariat DPRK Kabupaten Bener Meriah.....	276
39. Dinas Syariat Islam.....	286
40. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	300
41. Dinas Pendidikan Dayah.....	308
42. Kantor Camat Bukit	316
43. Kantor Camat Bandar	319
44. Kantor Camat Syiah Utama	322
45. Kantor Camat Permata	325
46. Kantor Camat Wih Pesam	328
47. Kantor Camat Timang Gajah	331
48. Kantor Camat Pintu Rime Gayo	334
49. Kantor Camat Gajah Putih	337
50. Kantor Camat Mesidah	340
51. Kantor Camat Bener Kelipah	342
52. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	345
53. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah.....	352
54. Sekretariat Majelis Adat Aceh.....	357
55. Sekretariat Baitul Maal Kabupaten	365
56. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.....	369
57. Inspektorat Daerah Kabupaten Bener Meriah.....	374
58. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	380
59. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset	401
60. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.....	415
61. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.....	420



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

~~BUPATI BENER MERIAH,~~

- Menimbang :**
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Nagara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
38. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
39. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
40. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
41. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
42. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 128 Tahun 2018

tentang.....

tentang Perubahan Keempat' atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

43. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 132 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2018 terdiri atas:

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 85.114.030.454,57
b. Dana Perimbangan	Rp. 580.388.983.190,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 213.189.243.550,97
Jumlah Pendapatan	<u>Rp. 878.692.257.195,54</u>
2. Belanja	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 276.854.247.169,00
2) Belanja Subsidi	Rp. 300.000.000,00
3) Belanja Hibah	Rp. 5.339.900.000,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 10.459.000.000,00
5) Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota & Pemdes	Rp. 152.038.223,44
6) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 204.874.131.320,00
7) Belanja Tidak Terduga	Rp. 3.240.769.500,00
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 67.047.325.760,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 146.791.578.697,00
3) Belanja Modal	<u>Rp. 164.511.557.740,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 879.570.548.409,44</u>
Surplus/(Defisit)	<u>(Rp. 878.291.213,90)</u>
3. Pembiayaan:	
a. Penerimaan	Rp. 2.542.886.938,87
b. Pengeluaran	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 2.542.886.938,87</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 1.664.595.724,97

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3.....

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Pasal 6

Peraturan Bupati Bener Meriah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 26 Agustus 2019 M
25 Dzulhijjah 1440 H



Diundangkan di : Redelong
pada tanggal : 27 Agustus 2019 M
26 Dzulhijjah 1440 H



BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2019 NOMOR : 24